

# **BAB I**

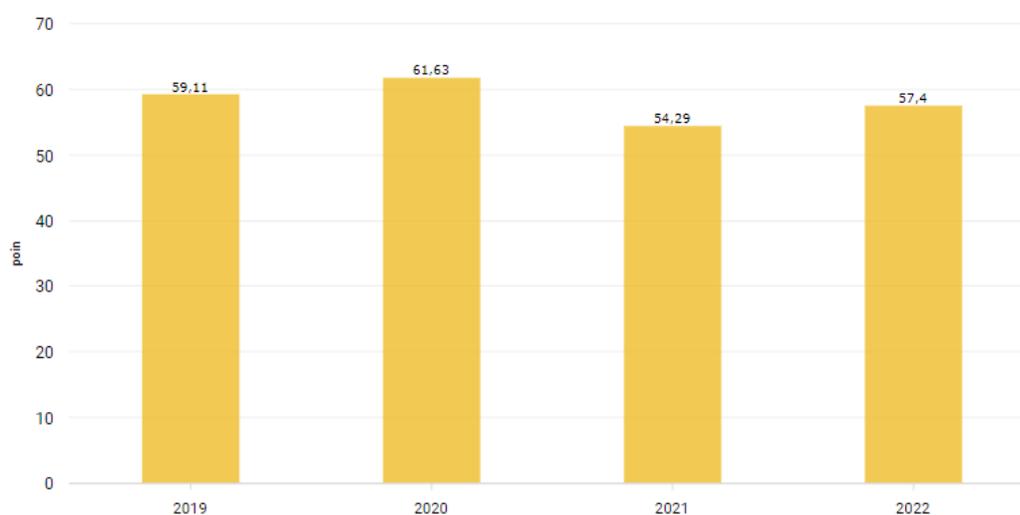
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Aktivitas membaca merupakan fondasi dasar dalam pembelajaran dan budaya membaca sebagai nilai filosofis yang mampu mengembangkan pola pikir dan sikap. Membaca sangat penting untuk menambah informasi dan pemahaman serta memperbaiki diri (Olasehinde et al., 2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Sistem Perbukuan Tahun 2017, budaya membaca disebut literasi. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pasal tersebut, pemerintah berkomitmen dan secara tegas ingin menyampaikan sebuah makna bahwa membaca merupakan tolak ukur utama dalam mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga peran dari sekolah sendiri sangat besar dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), nilai budaya literasi Indonesia sebesar 57,4 poin pada 2022. Nilai tersebut tercatat meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 yang sebesar 54,29 poin. Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek Aminudin Aziz dikutip oleh Databoks (2023) menjelaskan, nilai budaya literasi menjadi salah satu domain untuk membangun indeks pembangunan kebudayaan. Menurutnya, meskipun nilai budaya literasi nasional

mengalami peningkatan pada 2022, namun angkanya belum cukup baik untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Adapun Kemendikbudristek menyusun nilai ini berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup penduduk yang membaca, baik cetak maupun elektronik; penduduk yang mengakses internet; penduduk yang mengunjungi perpustakaan; dan pemanfaatan taman bacaan masyarakat.



Gambar 1.1. Tren Nilai Budaya Literasi di Indonesia (2019-2022)

Sumber: Databoks (2023)

Berdasarkan gambar di atas, secara keseluruhan jika melihat tren empat tahun terakhir, nilainya cenderung fluktuatif dan berkisar di nilai 50 hingga lebih dari 60 poin. Adapun nilai budaya literasi tertinggi nasional terjadi pada 2021 dengan skor 61,63 poin. Capaian ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan. Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah ketersediaan buku yang belum merata di hampir seluruh wilayah Indonesia serta rendahnya motivasi dan minat baca peserta didik. Hal ini memprihatinkan karena di era teknologi informasi, peserta didik dituntut untuk

memiliki kemampuan membaca dalam pengertian memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif (Stefany et al., 2017).

Kebutuhan literasi di era global ini menuntut pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan sesuai dengan UUD 1945, Pasal 31, Ayat 3, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat ini menegaskan bahwa program literasi juga mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi. Upaya ini sejalan dengan falsafah yang dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat (keluarga, pendidik profesional, pemerintah, dan lain-lain) dalam membina, menginspirasi/memberi contoh, memberi semangat, dan mendorong perkembangan anak (Direktorat Jenderal & Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Uji literasi membaca mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan (Slam, 2017).

Dalam PIRLS 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 45 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke- 64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Posisi Indonesia tetap pada urutan ke-64 pada PISA 2015, dengan peserta terdiri atas 72 negara. Hal ini berarti ada kenaikan hanya satu angka, dari 396 pada PISA 2012 menjadi 397 pada PISA 2015. Kenaikan tersebut tidak cukup signifikan ketika penerapan Kurikulum 2013 yang berbasis teks sudah diberlakukan sejak tahun 2013 dan dua tahun kemudian PISA (juga berbasis teks) ditempuh pada 2015.

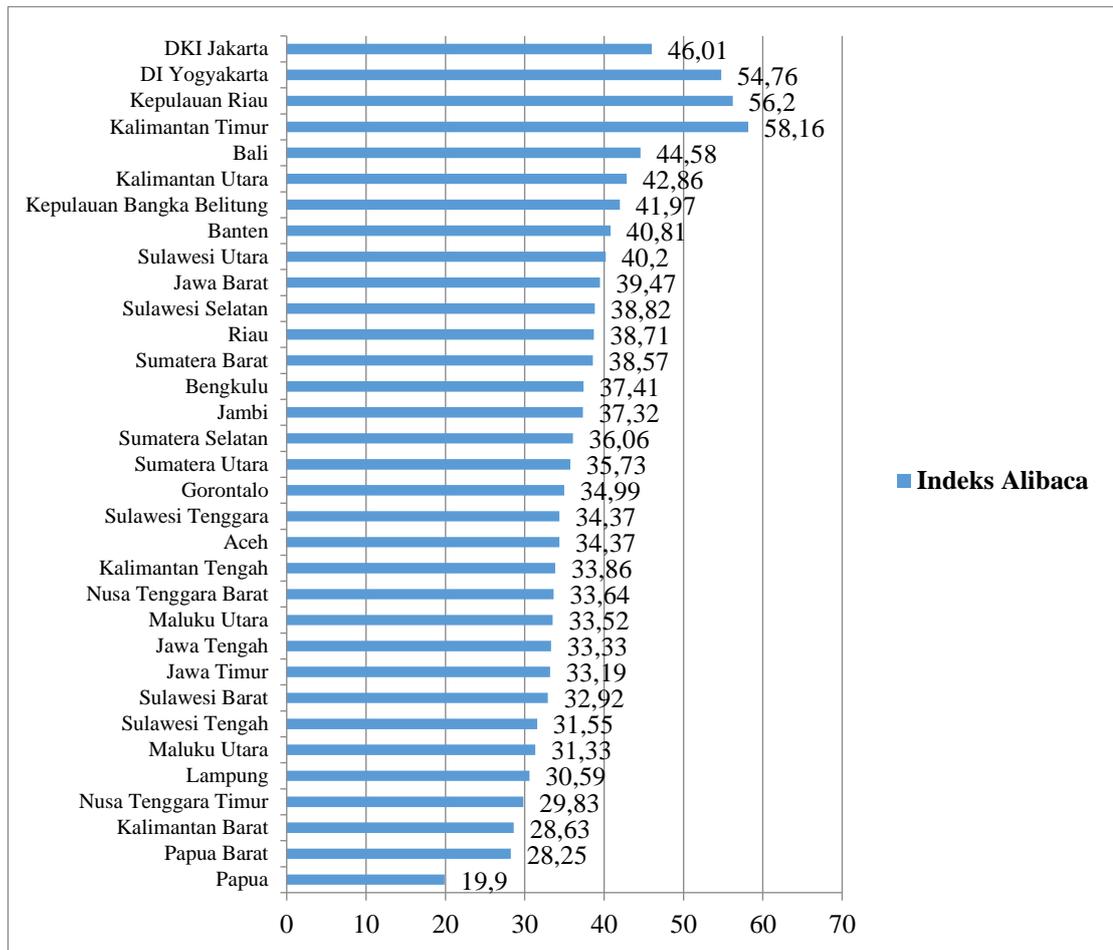
Pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam program *Indonesian National Assessment Program* (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas IV. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan hanya 6,06% dalam kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Permasalahan ini menegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi khusus agar kemampuan membaca peserta didik dapat meningkat dengan mengintegrasikan/menindaklanjuti program sekolah dengan kegiatan dalam keluarga dan masyarakat, yang diwadahi dalam gerakan literasi. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah digulirkan mulai Maret 2016 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi ke semua Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas

Pendidikan Kota/Kabupaten (Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud, 2018).

Dalam mengatasi rendahnya minat baca pada peserta didik, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLS dikembangkan berlandaskan 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintah atau disebut Nawacita, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, terdapat di butir ke 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Empat butir Nawacita tersebut terkait erat dengan komponen literasi sebagai modal pembentukan SDM yang berkualitas, produktif dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. GLS diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan yang warganya literat sepanjang hayat (Rahmawati & Rosdiana, 2021).

Berdasarkan ruang lingkup atau cakupan wilayah provinsi, diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) yang rendah. Dibuktikan dengan data yang dikutip oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur (2021) yaitu:



Gambar 1.2. Indeks Alibaca Provinsi menurut Peringkat dari Tinggi ke Rendah  
Sumber: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur (2021)

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur mendapati peringkat ke 26 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 33,19 yang tergolong rendah. Mengingat bahwa Indeks Alibaca Provinsi Jawa Timur yang tergolong rendah, maka peran pemerintah untuk terus meningkatkan literasi membaca harus terlaksana melalui kebijakan-kebijakan strategis khususnya di tingkat kabupaten. Mengingat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2020), budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan baik di sekolah maupun di luar sekolah atau kehidupan bermasyarakat.

Adapun dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, kebijakan terkait GLS direspon Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Gerakan Budaya Literasi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab III membahas mengenai kebijakan strategis pada satuan pendidikan dan masyarakat pasal tiga yaitu: (1) kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan seluruh satuan pendidikan, (2) setiap satuan pendidikan wajib mempunyai kegiatan literasi, (3) untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan- bahan bacaan nonpelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif serta menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Dalam rangka menyukseskan program GLS, Nyalanesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Festival Literasi Sidoarjo Tahun 2022. *Event* literasi terbesar di Kabupaten Sidoarjo ini merupakan pengembangan dari program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional yang telah terbukti membantu ribuan sekolah untuk berkarya dan berprestasi di tingkat nasional (Festivalliterasisidoarjo.id, 2023).



Gambar 1.3. Target Rekor MURI di Bidang Literasi  
Sumber: Festivalliterasisidoarjo.id (2023)

Dalam Festival Literasi Sidoarjo telah menetapkan target pemecahan rekor MURI dengan partisipasi 400 sekolah yang berorientasi pada target hasil program diantaranya yaitu 1) 20.000 Sertifikasi Kompetensi untuk Siswa, Guru, & Kepala Sekolah; 2) 20.000 Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berkarya dan Menerbitkan Buku; 3) 500 Penghargaan Sekolah dan Kepala Sekolah Aktif Literasi Nasional; 4) 500 Sekolah Sukses Mengembangkan Program Literasi Sekolah; 5) 1 Penghargaan Rekor MURI Bidang Literasi untuk Sekolah dan Pemerintah Kabupaten; dan 6) 3.000 Judul Buku Terbit Ber-ISBN Karya Siswa, Guru, dan Kepala Sekolah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dalam mewujudkan gerakan literasi.

Kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan seluruh satuan pendidikan. Setiap satuan

pendidikan wajib mempunyai program kegiatan literasi. Untuk mendukung program, satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi. Kegiatan literasi di luar satuan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2020).

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, Edward III dalam Anggaran (2014:250) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun dalam hal komunikasi, mengutip berita dari Radarjatim.id (2022) diketahui SMPN 4 Sidoarjo memiliki program Gerakan Literasi Menulis (Geliterlis) yang memberikan kebebasan kepada seluruh siswa-siswinya, yang jumlahnya sekitar 1.185 untuk mengekspresikan tulisan Puisi, Pantun, Geguritan, Kidungan, Pentigraf dan dalam bentuk Poster. Uniknya, kegiatan yang dilaksanakan di halaman sekolah tersebut, mereka juga diberikan kebebasan menulis menggunakan media apa saja. Mulai dari kayu talenan, kipas dan tempeh bambu yang dianyam, kanvas juga dari berbagai macam bentuk kertas. Sebagaimana pernyataan dari Kepala SMPN 4 Sidoarjo Lilik Sulistyowati, S.Pd M.Pd:

“Ini semua dalam rangka memotivasi anak-anak dan menumbuhkan, kreativitas dan inovasi anak-anak agar mereka ada pembiasaan, yang nantinya menjadi budaya. Karena sekarang ini masuk dalam bulan bahasa, sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda kami menggelar Geliterlis yang bertemakan ‘Kobarkan Karya, Jadilah Luar Biasa’. Geliterlis ini digelar dengan tujuan anak-anak mempunyai kreativitas, inovasi di dalam membuat karya yang

berupa karya literasi. Mereka kami bebaskan untuk memilih yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Bukan hanya siswa, tetapi kami juga melibatkan orang tua dan juga Komite. Dari situlah kami harapkan bisa melatih kreativitas siswa, karena seninya juga ada, siswa juga bisa berpikir kritis. Hasil karya mereka nantinya akan dipajang di seluruh lorong-lorong sekeliling sekolah. Dan akan kami petakan masing-masing, ada lorong puisi, lorong pantun, lorong geguritan, lorong kidungan, lorong pentigraf dan lorong poster. Yang lebih penting lagi, hasil tulisan mereka nanti juga akan kami ketik lagi dan seleksi terus akan kami cetak dalam bentuk buku.” (Sumber: <https://radarjatim.id/smpn-4-sidoarjo-kobarkan-karya-jadilah-luar-biasa-melalui-gerakan-literasi-menulis/> diakses pada 18 Oktober 2023)

Adanya program Geliterlis juga telah meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena bacaan yang siswa baca selalu memberikan hikmah yang dapat diambil dan dijadikan contoh. Dampak selanjutnya yang dirasakan adalah berkembangnya keterampilan berfikir analitis, kritis dan kreatif. Hal itu karena seperti menurut Aini (2018) menjelaskan bahwa membaca sebagai sebuah kegiatan komunikasi yang menjadi dasar dalam proses belajar. Ketika membaca seseorang akan mengalami proses berpikir, memprediksi, mempertanyakan, mengevaluasi dan mendefinisikan ulang.

Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa saat implementasi GLS berlangsung komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa masih terlihat membosankan karena tidak ada improvisasi menyelipkan *game* atau permainan interaktif di sela-sela kegiatan yang tentunya permainan tersebut memberikan manfaat juga terhadap siswa-siswi karena melalui pendekatan permainan tersebut siswa-siswi lebih menyukai dan membuat mereka tidak stres. Dalam proses belajar mengajar di kelas masih monoton yaitu guru masih menggunakan metode ceramah dan media yang digunakan tidak dapat menarik

perhatian siswa sehingga dapat membuat suasana kelas menjadi tidak menyenangkan. Selain itu, kurangnya media pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam belajar sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang belum ditekankan oleh sekolah yakni pada aspek kecerdasan intelektual. Sejalan dengan pendapat Pratiwi (2020), rendahnya kecerdasan intelektual disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu pembelajaran yang kurang menarik sehingga siswa merasa bosan dalam belajar. Christanti (2017) mengatakan bahwa masukan dari siswa yang perlu ditindaklanjuti adalah waktu membaca yang kurang panjang dan inovasi pelaksanaan program supaya tidak membosankan.

Selanjutnya dalam kriteria sumber daya terbagi menjadi 2 (dua) yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya sarana dan prasarana. Kebijakan GLS terus dilakukan baik dengan pemerintah dan instansi serta lembaga pendidikan di lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dalam proses implementasi GLS, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sidoarjo memiliki program yaitu Baca Tulis Online (Calisline). Program tersebut menjadikan SMPN 4 Sidoarjo sebagai sekolah tingkat SMP Pertama di Kabupaten Sidoarjo yang menerima penghargaan dalam melaksanakan GLS. Calisline sendiri merupakan modifikasi inovasi dari implementasi yang sudah dijalankannya Gerakan Budaya Literasi (GBL) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 yang bertujuan mengembangkan kecakapan literasi siswa pada seluruh mata pelajaran yang sudah dikembangkan SMPN 4 Sidoarjo selama ini.

Pelaksanaan program Calisline ini meraih peringkat Top 45 Kovablik Jatim (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lulus pada penilaian Top 30 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jatim tahun 2020 yang sebelumnya gerakan ini mendapatkan penghargaan Juara 2 Kelompok Budaya Kerja Tingkat Jawa Timur di Tahun 2018. Sebagaimana yang diungkapkan di website resmi [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id) yakni:

Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, kali ini penghargaan diberikan kepada Kelompok Budaya Kinerja (KBK) Baca Tulis Online atau disingkat Calisline yang dijalankan SMPN 4 Sidoarjo atas prestasinya menjadi terbaik kedua pada Kompetisi Budaya Kinerja (SIYAKIN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Baca tulis online atau disingkat “Calisline” merupakan inovasi pemerintah kabupaten Sidoarjo dibidang pendidikan yang dipilih pemerintah propinsi Jawa Timur masuk dalam kategori Top 45 Kovablik Jatim (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik). “Calisline” merupakan inovasi yang dibuat oleh SMPN 4 Sidoarjo dengan tujuan meningkatkan literasi baca tulis siswa.” (Sumber: <https://www.sidoarjokab.go.id/calisline-masuk-top-45-kovablik-jatim> diakses pada 25 Juli 2022)

Akan tetapi, meskipun GLS di SMPN 4 Sidoarjo memiliki berbagai prestasi diketahui sudut baca yang ada di perpustakaan sekolah masih belum dipenuhi dengan sarana dan prasarana yang optimal seperti kurangnya koleksi buku, rak buku dengan penataan yang mengganggu tempat anak melakukan kegiatan membaca di perpustakaan sekolah, tidak adanya hiasan di dinding. Hasil observasi peneliti di lapangan terdapat berbagai faktor yang menghambat berjalannya implementasi GLS. Misalnya dari faktor eksternal terdapat beberapa masalah seperti terbatasnya anggaran khusus untuk pengadaan buku anak, kesadaran minat baca siswa yang beragam, serta ketersediaan bahan bacaan anak yang kurang atau mulai rusak.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan parameter yang dapat digunakan sekolah untuk membangun budaya literasi sekolah yang baik oleh Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud (2018) dalam buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah yang menjelaskan bahwa dalam parameter lingkungan fisik harus tersedia buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas. Selain itu, kondisi tersebut juga belum sesuai dengan parameter lingkungan akademis. Secara lebih detail berikut ini penjelasan ekosistem sekolah literat yang dibuat oleh Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud (2018):

<b>A</b>	<b>Lingkungan Fisik</b>
1	Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).
2	Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
3	Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas.
4	Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.
5	Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak.
6	Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.
<b>B</b>	<b>Lingkungan Sosial dan Afektif</b>
1	Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademis dan nonakademis) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan.
2	Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.
3	Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya.
4	Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing-masing.
5	Terdapat waktu yang memadai bagi TLS untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya.
6	Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.
<b>C</b>	<b>Lingkungan Akademis</b>
1	Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal.
2	Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati ( <i>sustained silent reading</i> ), membacakan buku dengan nyaring ( <i>reading aloud</i> ), membaca bersama ( <i>shared reading</i> ), membaca terpandu ( <i>guided reading</i> ), diskusi buku, bedah buku, presentasi ( <i>show-and-tell presentation</i> ).
3	Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.
4	Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
5	Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
<b>C</b>	<b>Lingkungan Akademis</b>
6	Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.
7	Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain).
8	Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.
9	Guru menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran.

Gambar 1.4. Parameter Dalam Membangun Ekosistem Sekolah yang Literat  
Sumber: Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud (2018)

Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik penting dalam pembiasaan membaca guna pengembangan budaya literasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat mengadaptasinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Namun, saat ini kegiatan di sekolah SMPN 4 Sidoarjo ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan pembiasaan membaca literasi warga sekolah, khususnya guru dan siswa. Meskipun buku teks pelajaran juga termasuk dalam bagian literasi, akan tetapi kegiatan membaca di sekolah tampaknya masih terbatas pada membaca buku teks pelajaran, belum meluas pada buku-buku non teks pelajaran. Menurut Pritasiwi (2021), berbagai macam literasi yang bervariasi dapat menjadi stimulis yang baik siswa agar senang dengan literasi.

Padahal GLS merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pembiasaan membaca siswa. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca (guru membacakan buku dan/atau siswa dan guru membaca dalam hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah) sebagaimana diatur dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah oleh Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud. Rahmawati & Rosdiana (2021) mengatakan bahwa GLS belum dapat dioptimalisasikan dengan sempurna apabila keterbatasan sarana prasarana dalam memberi peluang untuk seluruh siswa agar selalu mengembangkan keterampilan dan kompetisinya.

Selanjutnya dalam kriteria disposisi juga ditemukan masih lemahnya kognisi atau pemahaman dari pelaksana kebijakan GLS di SMPN 4 Sidoarjo. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap

pentingnya kemampuan berliterasi dalam kehidupan mereka serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah selain buku-teks pelajaran. Guru dan pimpinan sekolah perlu bekerjasama untuk mengimplementasikan strategi pembiasaan membaca tersebut. Sedangkan guru-guru menginginkan petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo lengkap dengan panduan penilaian dan pelaporan kepada orang tua siswa. Sekolah perlu memikirkan cara bagaimana memotivasi gurunya supaya lebih gemar membaca dan menulis. Dengan mewujudkan gerakan literasi sekolah, menggambarkan adanya bentuk komitmen sekolah dalam menjalankan tanggung jawabnya, di mana Hendrayanti (2018) dalam Ratnah & Suastika (2022) menjelaskan bahwa sekolah merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab mewujudkan budaya baca yang merupakan bagian penting dalam kegiatan pembelajaran. Pihak sekolah harus bisa menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan kembangkan budaya literasi siswa.

Pada kriteria terakhir yakni struktur birokrasi menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi penelitian, SMPN 4 Sidoarjo garis struktur birokrasi kebijakan hanya sebatas terkait pihak Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan program yang diusulkan untuk kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Program yang sudah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar diberikan arahan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari program yang dilaksanakan. Adanya prestasi melalui program Calisline juga disebabkan oleh dibuatnya SK Tim Literasi Sekolah, yang melibatkan semua unsur

di sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, wali peserta didik, komite sekolah, siswa dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan yang dialami SMPN 4 Sidoarjo mengenai pelaksanaan program GLS menarik untuk diteliti lebih mendalam sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Dalam Pembiasaan Membaca di SMP Negeri 4 Sidoarjo”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam pembiasaan membaca di SMPN 4 Sidoarjo?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam pembiasaan membaca di SMPN 4 Sidoarjo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini kedepannya diharapkan bisa membuahkan dampak positif dan nilai secara praktis ataupun teoritis yang berhubungan pada bidang keilmuan Administrasi Publik, khususnya evaluasi kebijakan publik. Didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan dengan penjasalann sebelumnya di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang implementasi gerakan literasi sekolah dan dapat mengembangkan konsep serta penerapan tentang implementasi GLS terhadap guru dan para pelaku pegiat literasi lainnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pengetahuan khususnya mengenai implementasi GLS di SMPN 4 Sidoarjo yang merupakan lokasi penelitian sebagai bahan masukan serta kajian terkait gerakan budaya literasi yang telah dilakukan. Sehingga berbagai data yang didapat juga bisa digunakan sebagai pengetahuan sudah sejauh mana pelaksanaan gerakan budaya literasi dan permasalahannya dan dapat dijadikan pembelajaran serta perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program di masa mendatang